

Volume 10, Nomor 2, Desember 2014

ISSN: 2086-5058

# NALAR FIQH

---

Kebijakan Fiskal dan Respon Belanja Negara Terhadap Siklus Ekonomi  
(Pelajaran dari Kisah Nabi Yusuf dan Pendapat Ibnu Khaldun)  
*Novi Mubyarto*

---

Internal Auditor Kedudukan dan Fungsinya Pada Bank Jambi Syariah  
*Mellya Embun Baining*

---

Menyoal Asuransi Konvensional  
(Studi Terhadap Pengaruh Maisir dan Gharar Pada Asuransi Konvensional)  
*Nofrianto*

---

Sistem Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Dalam Islam  
*Fauzi Muhammad*

---

Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam  
*Youdhi Prayogo*

---

Etika Bisnis Internasional Nabi Muhammad SAW  
*Robi'atul Adawiyah*

---

Kualitas Pelayanan Islami Pada Perbankan Syariah  
*Rafidah*

## STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL DALAM MERESPON SIKLUS EKONOMI

(Pelajaran dari Kisah Nabi Yusuf dan Pendapat Ibnu Khaldun)

Novi Mubyarto<sup>\*</sup>

### **Abstract:**

*One important aspect in achieving macroeconomic stability is how to synchronize fiscal policy with the economic cycle. That requires precision in determining the government's fiscal policy strategy will be executed. Is countercyclical strategy, procyclical or acyclical. However, from a variety of theoretical and empirical studies on fiscal policy strategies in both the conventional economic system and the Islamic economic system, it appears that fiscal policy Ideally possess as automatic economic stabilizer. That is, the economy is undergoing expansion, then government spending should be reduced or increased tax revenue (contractionary fiscal policy). Conversely, if the economy is experiencing a contraction (recession), the expansionary fiscal policy should through increased spending or a decrease in tax revenues (expansive fiscal policy). Thus, the automatic stabilizers of fiscal policy requires countercyclical function of fiscal policy.*

**Keywords:** Economic cycle, countercyclical fiscal policy, acyclical fiscal policy, procyclical fiscal policy.

## I. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi.<sup>1</sup> Atau dapat juga dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.<sup>2</sup> Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih luas, diantaranya stabilisasi permintaan agregat, tingkat produksi, dan kesempatan kerja atau redistribusi pendapatan.<sup>3</sup>

Tujuan kebijakan fiskal cenderung berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, peran kebijakan fiskal umumnya untuk mempertahankan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dan menstabilkan pertumbuhan

---

<sup>\*</sup> Dosen Ekonomi Islam IAIN STS Jambi

<sup>1</sup> Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, Budi Trisnanto. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol. 14, No. 4, April 2012. Hal. 390.

<sup>2</sup> Ani Sri Rahayu. "Pengantar Kebijakan Fiskal." Penerbit: Bumi Aksara. Jakarta. 2010. Hal. 1.

<sup>3</sup> Makmun Syadullah dan Muhammad Afdi Nizar. "Kebijakan Fiskal : Teori dan Praktek di Indonesia." Penerbit: Observation & Research of Taxition (ortex), Jakarta 2013. Hal. 1.

ekonomi. Sebaliknya di negara-negara berkembang, kebijakan fiskal digunakan untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat.<sup>4</sup>

Begitu pula dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sama seperti dalam ekonomi non-Islam (yaitu tujuan stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang dapat diterima) ditambah tujuan lain yang diwujudkan dalam doktrin Islam atau harus dicapai dalam rangka menerapkan hukum Islam.<sup>5</sup>

Salah satu aspek penting dalam strategi kebijakan fiskal adalah masalah sinkronisasi kebijakan fiskal dengan siklus bisnis perekonomian. Idealnya, kebijakan fiskal memiliki sifat sebagai *automatic stabilizer* perekonomian. Artinya, dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi, maka pengeluaran pemerintah seharusnya berkurang atau penerimaan pajak yang bertambah. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi, kebijakan fiskal seharusnya ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan pajak. Dengan demikian, *automatic stabilizer* kebijakan fiskal mensyaratkan adanya fungsi *countercyclical* dari kebijakan fiskal.<sup>6</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam, strategi kebijakan fiskal yang mensyaratkan adanya fungsi *countercyclical* telah pernah diterapkan oleh Nabi Yusuf dalam kapasitasnya sebagai bendahara negara, sebagai respon terhadap peringatan yang terkandung dalam mimpi Raja Mesir, bahwa akan datang masa tujuh tahun yang sukar dan sulit. Maka untuk menghadapi masa itu, Nabi Yusuf mempersiapkan gudang dan kepuk-kepuk bagi penyimpanan bahan makanan untuk musim kemarau yang akan datang.<sup>7</sup>

## II. FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL

Secara umum fungsi kebijakan fiskal adalah fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi perekonomian. Dalam hal alokasi, maka digunakan untuk apa sajakah sumber-sumber keuangan negara, sedangkan distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di

---

<sup>4</sup> Ibid. Hal. 1.

<sup>5</sup> Metwally. M. M. "Fiscal Policy in an Islamic Economy." Institute of Policy Studies And International Centre for Research in Islamic Economics – 1983. Hal. 52.

<sup>6</sup> Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, Budi Trisnanto. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol. 14, No. 4, April 2012. Hal. 391.

<sup>7</sup> Makmum Syadullah. "Kebijakan Fiskal dan Kisah Nabi Yusuf." <http://makmunr.blogspot.com/>

masyarakat, dan stabilisasi adalah bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil.<sup>8</sup>

- a. Fungsi alokasi (allocation function of budget policy). Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah melakukan intervensi terkait dengan cara-cara bagaimana perekonomian (negara) mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi. Intervensi pemerintah ini dapat dilakukan secara langsung dengan menyediakan barang-barang publik (public goods) atau barang-barang sosial (social goods), seperti pertahanan dan pendidikan, dan secara tidak langsung, melalui instrumen pajak dan subsidi, yang mendorong atau menghambat berbagai aktivitas dalam perekonomian.
- b. Fungsi distribusi (distribution function), berkaitan dengan bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat didistribusikan diantara anggota-anggota masyarakat. Cabang ini berkaitan dengan isu-isu seperti pemerataan. Dan trade-off antara pemerataan dan efisiensi. Piranti kebijakan fiskal yang lazim diimplementasikan terkait dengan fungsi distribusi adalah skim transfer-pajak (tax-transfer scheme) yang mengkombinasikan pajak progresif kepada rumah tangga/individu yang berpendapatan tinggi dengan pemberian subsidi kepada rumah tangga/individu yang berpendapatan rendah.
- c. Fungsi stabilisasi (stabilization function), berkaitan dengan upaya menjamin perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan tingkat harga yang stabil. Dukungan kebijakan antara lain dengan menaikkan belanja karena permintaan bertambah, sehingga terjadi ekspansi anggaran. Kebijakan penurunan pajak juga dapat dijadikan instrumen untuk mendorong permintaan.

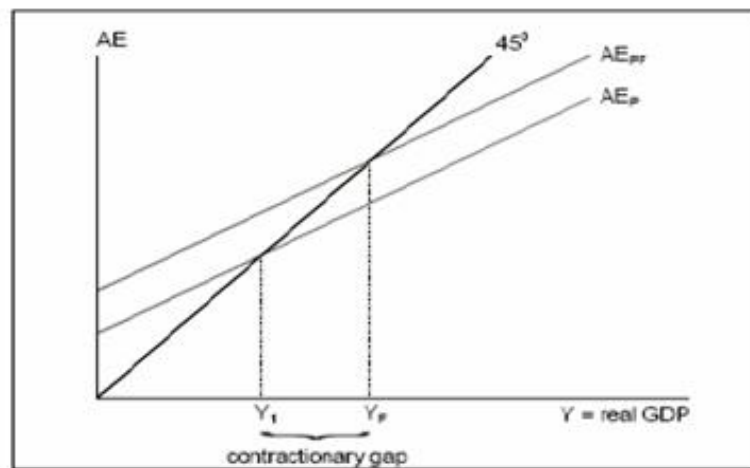
### III. JENIS KEBIJAKAN FISKAL

Pada dasarnya, jenis kebijakan fiskal terbagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto.

---

<sup>8</sup> Makmun Syadullah dan Muhammad Afdi Nizar. "Kebijakan Fiskal : Teori dan Praktek di Indonesia." Penerbit: Observation & Research of Taxition (ortex), Jakarta 2013.

Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.<sup>9</sup> Adapun mekanisme peningkatan pengeluaran pemerintah (G) ataupun penurunan pajak (T) terhadap output adalah sebagai berikut, pada grafik (1.1) maka dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah ( $\Delta G$ ) naik atau selisih pajak ( $\Delta T$ ) turun maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat ke atas sehingga pendapatan akan naik dari ( $Y_1$ ) menjadi ( $Y_f$ ).<sup>10</sup>



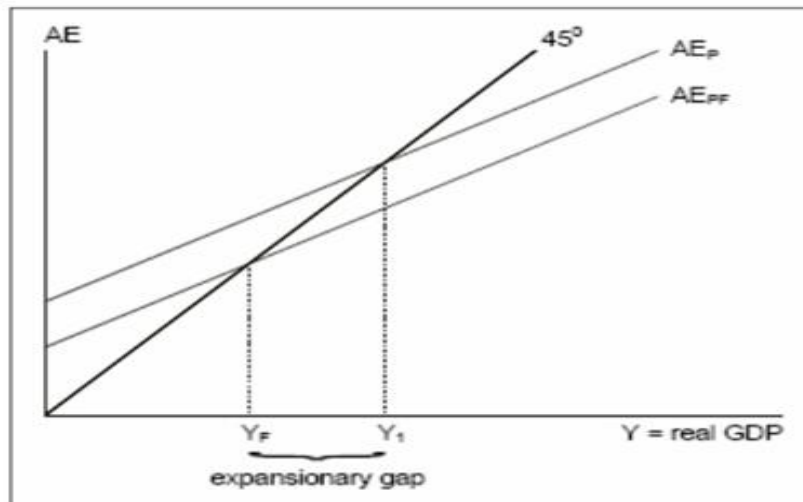
Gambar 1.1. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Sementara itu, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.<sup>11</sup> Adapun mekanisme penurunan pengeluaran pemerintah (G) ataupun kenaikan pajak (T) terhadap output (Y) adalah sebagai berikut, secara grafik kebijakan fiskal kontraktif diagram pada gambar 1.2.

<sup>9</sup> Ani Sri Rahayu. "Pengantar Kebijakan Fiskal." Penerbit: Bumi Aksara. Jakarta. 2010. Hal. 6 – 7.

<sup>10</sup> Naf'an. "Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah." Penerbit: Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal. 170.

<sup>11</sup> Ibid. Hal. 172-173.



Gambar 1.2. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Pada gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah ( $\Delta G$ ) turun atau selisih pajak ( $\Delta T$ ) naik maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat kebawah, sehingga pendapatan akan turun dari ( $Y_1$ ) menjadi ( $Y_f$ ).<sup>12</sup>

#### IV. STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL DAN SIKLUS EKONOMI

Setiap negara mengharapkan suatu perekonomian yang ideal di mana pertumbuhan ekonomi diharapkan tumbuh secara terus menerus, tanpa mengalami penurunan. Pertumbuhan tersebut disertai stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas. Sayangnya, dalam dunia nyata perekonomian umumnya mengalami kondisi yang naik turun, setidaknya-didaknya dilihat dari perkembangan tingkat *output* dan harga. Naik turunnya aktivitas ekonomi tersebut relatif terjadi dan terjadi berulang-ulang dengan rentang waktu yang bervariasi. Dalam ilmu ekonomi, gerak naik turun tersebut dikenal sebagai siklus bisnis (*The Business cycle*).<sup>13</sup>

Perilaku kebijakan fiskal dalam menghadapi siklus bisnis (*business cycles*) telah lama menjadi pembahasan di kalangan ekonom. Berdasarkan aliran pemikiran, terdapat dua kelompok utama yang mengemukakan pandangan mereka berkaitan dengan perilaku kebijakan fiskal dan siklus bisnis, yaitu ekonom pendukung Keynesian (*counter-cyclical*) dan ekonom pendukung hipotesis *tax-smoothing*.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ibid. Hal. 172-173.

<sup>13</sup> Chenny Seftarita. "Teori Kebijakan Ekonomi Makro dan Siklus Bisnis." <http://chenyseftarita.blogspot.com/>

<sup>14</sup> Muhammad Afdi Nizar. "Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia 2000-2009." Tesis. FE UI, 2010. Hal. 25-26.

Pendukung Keynesian yang lebih menyukai kebijakan fiskal *countercyclical* menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan belanja dan/atau menurunkan tarif pajak selama resesi untuk menstimulasi permintaan agregat dan secara parsial mencegah penggunaan sumber daya ekonomi yang tidak optimal (*underemploying*) dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, dalam periode ekspansi (*booms*) pemerintah harus melakukan pengurangan belanja dan/atau menaikkan tarif pajak untuk mendinginkan (*cool off*) perekonomian dan mengendalikan tekanan inflasi.<sup>15</sup>

Menurut perspektif ini, pemerintah sebaiknya mengurangi belanja sebagai proporsi dari PDB selama periode booms, dan meningkatkannya selama masa resesi. Perspektif ini mengikuti hipotesis perataan konsumsi (*consumption-smoothing hypothesis*) yang menyatakan bahwa fungsi belanja pemerintah sebaiknya menempati pendapatan permanen dasar, bukan pendapatan lancar (*current income*). Apabila pemerintah memperhatikan *smoothing* jalur produksi dan dianggap mampu menstabilisasi output, pemerintah dapat mengoperasikan kebijakan fiskal *countercyclical*. Identy adalah bahwa guncangan negatif terhadap permintaan atas barang-barang domestik secara parsial bisa diimbangi dengan peningkatan permintaan pemerintah. Dengan cara yang sama, pemerintah dapat mengkontraksi kegiatannya selama periode boom, untuk menghindari memanasnya (*overheating*) perekonomian domestik.<sup>16</sup>

Argumen lain adalah model *tax-smoothing* yang diperkenalkan oleh Barro (1979). Model ini menyatakan bahwa kebijakan sebaiknya tetap netral selama siklus bisnis dan hanya merespon perubahan-perubahan yang tidak diantisipasi yang mempengaruhi konstrain anggaran pemerintah.<sup>17</sup> Barro menjelaskan bahwa biaya-biaya pajak yang distortif, disamping program yang *countercyclical* untuk belanja pemerintah sebagai rasio dari PDB, menimbulkan *tax smoothing* sebagai kebijakan fiskal optimal. Misalkan, dalam skenario Barro, pajak yang konstan dipilih (yang menghindari distorsi antar waktu yang terjadi jika tarif pajak berubah selama siklus ekonomi), sehingga anggaran secara rata-rata berimbang selama siklus ekonomi. Akibatnya, penerimaan pajak sebagai rasio terhadap PDB bersifat *acyclical* – dengan tarif pajak konstan, penerimaan naik tajam selama boom dan turun selama resesi. Namun demikian, dengan jalur belanja pemerintah yang bersifat

---

<sup>15</sup> Ernesto Stein, Ernesto Talvi, and Alejandro Grisanti. "Institutional Arrangements and Fiscal Performance: The Latin American Experience." Working Paper, Inter-American Development Bank, Office of the Chief Economist, No. 367.

<sup>16</sup> Philip R. Lane. "Irish Fiscal Policy under EMU." *Irish Banking Review*, Winter 1998.

<sup>17</sup> Ernesto Talvi and Carlos A. Vegh. Tax base Variability and Procyclical Fiscal Policy NBER Working Paper 7499, National Bureau of Economic Research, Inc.

*countercyclical* dan rasio pajak terhadap PDB yang *acyclical*, defisit anggaran bersifat *countercyclical*.<sup>18</sup> Berdasarkan argumen tersebut, pada satu sisi, apabila pengambil keputusan mengikuti aturan Keynesian, dapat dikatakan selama siklus bisnis korelasi positif antara tarif pajak dan output, dan korelasi negative antara belanja pemerintah dan output. Pada sisi lain, jika pengambil keputusan mengikuti argumen Barro, korelasi tersebut sangat rendah, hampir mendekati nol.<sup>19</sup>

Siklus dapat terjadi dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, tergantung sistem ekonomi yang dianut dan penyebab siklus dalam suatu negara. Kaum kapitalis memperkirakan bahwa akan terjadi krisis (*economics down turn*) dalam siklus bisnis setiap 25 tahun sekali, sedang kaum sosialis memperkirakan krisis akan terjadi setiap 45 tahun sekali, jangka waktu ini lebih panjang mengingat besarnya peran pemerintah dalam perekonomian terutama dalam pengaturan harga. Kalau kita melihat ke belakang, sejarah terjadinya resesi tahun 1929-1932 telah menyadarkan ekonom klasik tentang adanya siklus bisnis dalam perekonomian. Keseimbangan pasar yang diatur oleh mekanisme pasar terkadang tidak selamanya terjadi karena adanya potensi *over supply* (kelebihan penawaran) dalam perekonomian. Kenyataannya, *full employment* (penggunaan tenaga kerja penuh) tidak akan pernah dapat dicapai, perekonomian akan selalu dihadapkan pada masalah inflasi dan pengangguran. Pada satu sisi perekonomian berusaha untuk memaksimalkan output (maksimisasi penggunaan *resources*), sedang pada sisi yang lain akan ada ancaman stabilitas harga. Adanya keterbatasan *resources* (faktor-faktor produksi, termasuk didalamnya tenaga kerja) menyebabkan pada satu titik kenaikan harga akan melampaui kenaikan barang yang diproduksi, akibatnya akan ada penurunan pendapatan riil masyarakat sehingga akan terjadi penurunan permintaan (kelebihan *supply*). Kelebihan supply ini akan menyebabkan berlakunya pengangguran faktor-faktor produksi (termasuk tenaga kerja) dalam perekonomian.<sup>20</sup>

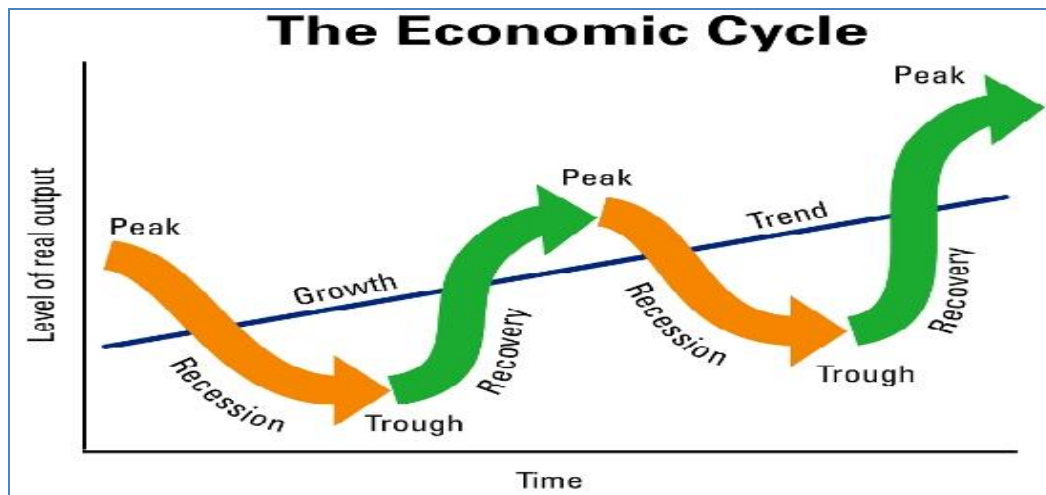
---

<sup>18</sup> Philip R. Lane. "Irish Fiscal Policy under EMU." *Irish Banking Review*, Winter 1998.

<sup>19</sup> Ernesto Talvi and Carlos A. Vegh. Tax base Variability and Procyclical Fiscal Policy NBER Working Paper 7499, National Bureau of Economic Research, Inc.

<sup>20</sup> *Ibid.*





Gambar 1.3. Siklus Ekonomi

Dari gambar 1.3 maka siklus bisnis (ekonomi) dapat digambarkan sebagai gelombang naik-turun aktivitas ekonomi. Siklus ini terdiri atas empat elemen, yaitu:

- a. Gerakan menaik (*Recovery*)
- b. Titik puncak (*peak*)
- c. Gerakan Menurun (*recession*)
- d. Titik terendah (*trough*)

Pada saat fase gerakan menaik, biasanya pertumbuhan ekonomi meningkat dan menyebabkan daya beli masyarakat meningkat. Pada fase ini inflasi bergerak naik sampai pada titik puncak dan inflasi mencapai titik optimum pada satu siklus tersebut kemudian akan kembali menurun seiring penurunan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Gerakan menurun berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran dan deflasi atau penurunan harga-harga barang dan jasa. Kadang kala karena berbagai faktor, terjadi pertumbuhan ekonomi yang begitu baik, sehingga titik kulminasinya jauh di atas biasanya atau disebut kondisi *boom*. Namun sebaliknya dapat juga terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi jauh dibawah titik nadir yang biasanya. Hal ini disebut depresi (*depression*). Sebagai contoh, depresi besar (*great depression*) yang dialami negara-negara kapitalis selama 1929-1932, di mana *output* ekonomi berkurang drastis sementara tingkat pengangguran tercatat sangat tinggi. Demikian juga dengan krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia yaitu krisis moneter tahun 1997/1998 di mana

pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) sebesar 15 % pertahun di tahun 1998.<sup>21</sup>

Dalam literatur ekonomi setidaknya terdapat tiga strategi kebijakan fiskal dalam hal merespon siklus ekonomi.<sup>22</sup>

1. Kebijakan Fiskal *Countercyclical*.

Kebijakan fiskal dikatakan countercyclical karena cenderung menstabilisasi siklus bisnis (yaitu, kebijakan fiskal bersifat kontraktif pada waktu perekonomian mengalami ekspansi (good times) dan ekspansif pada waktu perekonomian mengalami kontraksi atau resesi (bad times). Kebijakan fiskal countercyclical ditandai dengan belanja pemerintah yang lebih rendah (lebih tinggi) dan tarif pajak lebih tinggi (lebih rendah) pada waktu ekonomi berekspansi (berkontraksi).

2. Kebijakan Fiskal *Procyclical*.

Kebijakan fiskal dikatakan procyclical karena cenderung mendukung atau mengikuti siklus bisnis (yaitu, kebijakan fiskal bersifat ekspansif pada good times dan kontraktif pada bad times). Kebijakan fiskal procyclical ditandai dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi (lebih rendah) dan tarif pajak lebih rendah (lebih tinggi) pada good (bad) times.

3. Kebijakan Fiskal *Acyclical*.

Kebijakan fiskal dikatakan acyclical karena tidak mendukung atau menstabilisasi siklus bisnis. Kebijakan fiskal acyclical ditandai dengan belanja pemerintah dan tarif pajak yang tetap (konstan) selama siklus (atau lebih jelasnya belanja pemerintah dan tarif pajak tidak berubah secara sistematis seiring dengan siklus bisnis).

Tabel 1.1. Indikator Fiskal : Korelasi Teoritis dengan Siklus Bisnis

Fiscal indicators: theoretical correlations with the business cycle							
	<i>g</i>	$\tau$	Tax revenues	Primary balance	<i>g</i> /GDP	Tax revenues/GDP	Primary balance/GDP
Countercyclical	-	+	+	+	-	-/0/+	-/0/+
Procyclical	+	-	-/0/+	-/0/+	-/0/+	-/0/+	-/0/+
Acyclical	0	0	+	+	-	-/0/+	-/0/+

Sumber : Kaminsky, Reinhart and Végh ( 2004)<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Chenny Seftarita. "Teori Kebijakan Ekonomi Makro dan Siklus Bisnis." <http://chennyseftarita.blogspot.com/>

<sup>22</sup> Muhammad Afdi Nizar. "Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia 2000-2009." Tesis. FE UI, 2010. Hal. 27-28.

Untuk memahami implikasi teoritis dari siklus bisnis terhadap indikator fiskal, dapat diperhatikan uraian berikut ini<sup>24</sup> :

- a. Misalkan kebijakan fiskal acyclical. Karena tarif pajak konstan selama siklus dan basis pajak bertambah pada good times dan berkurang pada bad times, maka penerimaan pajak berkorelasi positif dengan siklus bisnis. Hal ini pada gilirannya berimplikasi pada keseimbangan primer yang juga berkorelasi positif dengan siklus. Rasio belanja pemerintah (neto dari pembayaran bunga) terhadap PDB berkorelasi negatif dengan siklus karena belanja pemerintah tidak berubah dan, menurut definisi, PDB tinggi (rendah) pada good (bad) times. Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi (rendah) pada good (bad) times, korelasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan siklus bersifat mendua atau ambiguous. (yaitu menjadi positif, nol, atau negatif sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas). Akibatnya, korelasi keseimbangan primer sebagai proporsi dari PDB dengan siklus juga ambiguous.
- b. Misalkan kebijakan fiskal procyclical. Karena menurut definisi, tarif pajak turun (naik) pada good (bad) times, namun basis pajak bergerak dengan arah yang berlawanan, maka korelasi penerimaan pajak dengan siklus ambiguous. Karena g naik pada good times, korelasi  $g/GDP$  pada prinsipnya bisa bernilai salah satu. Dengan perilaku siklikal penerimaan pajak yang ambiguous, perilaku siklikal penerimaan pajak sebagai proporsi GDP juga ambiguous. Perilaku keseimbangan primer sebagai proporsi PDB juga menjadi ambiguous.
- c. Misalkan kebijakan fiskal countercyclical. Per definisi, tarif pajak tinggi pada good times dan rendah pada bad times, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak berubah secara positif (searah) dengan siklus. Hal yang sama juga berlaku bagi keseimbangan primer karena penerimaan pajak naik (turun) dan belanja pemerintah turun (naik) pada good (bad) times. Rasio  $g/GDP$  akan berubah secara negatif (berlawanan arah) dengan siklus karena  $g$  turun (naik) pada good (bad) times. Karena penerimaan pajak meningkat pada good times, perilaku penerimaan pajak

---

<sup>23</sup> Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart, Carlos A. Végh. "When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies." NBER Macroeconomics Annual 2004, Volume 19.

<sup>24</sup> Muhammad Afdi Nizar. "Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia 2000-2009." Tesis. FE UI, 2010. Hal. 28-29.

sebagai proporsi PDB akan menjadi ambiguous dan, karena itu, perilaku keseimbangan primer sebagai proporsi dari PDB juga ambiguous.<sup>25</sup>

## V. KETERBATASAN KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal memiliki beberapa kelemahan. Masalah-masalah administratif dapat mengurangi keefektifan pelaksanaan kebijakan fiskal. Masalah administratif dari kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada aspek-aspek berikut: *menyadari masalah yang timbul, merumuskan kebijakan yang akan dijalankan, dan melaksanakan kebijakan yang dirumuskan.*<sup>26</sup>

### a. Menyadari Masalah Yang Timbul.

Kegiatan ekonomi tidak selalu berkembang secara teratur. Adakalanya berkembang dengan cepat, mengalami perlambatan dalam perkembangannya, atau mengalami kemerosotan. Apabila berlaku perlambatan atau pengurangan dalam kegiatan ekonomi belum tentu hal tersebut merupakan suatu masalah serius yang perlu diatasi. Perubahan seperti itu mungkin bersifat temporer, yang mungkin dengan sendirinya akan pulih kembali tanpa sesuatu campur tangan atau intervensi pemerintah. Perhatikan contoh berikut. Misalkan di sesuatu negara dihadapi masalah perkembangan ekspor yang lambat dan mengakibatkan kelesuan kegiatan ekonomi secara keseluruhannya. Dalam keadaan seperti itu pemerintah perlu bertanya : Adakah masalah ini merupakan masalah yang sementara? Atau apakah masalah tersebut akan menjadi lebih serius? Apabila hal tersebut merupakan masalah sementara, dan dalam waktu yang dekat kegiatan ekonomi akan pulih kembali, pemerintah tidak perlu melakukan langkah-langkah yang berusaha memulihkan kegiatan ekonomi, Akan tetapi, apabila masalah tersebut akan semakin berkepanjangan, sebaiknya kebijakan pemerintah untuk mengatasinya dilaksanakan dengan segera.

Dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan masalah sementara atau masalah yang permanen dan berkepanjangan. Kesalahan dalam menginterpretasi keadaan yang sebenarnya dapat menimbulkan masalah ekonomi yang lebih serius. Perhatikan contoh berikut. Pada mulanya ekonomi mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Seterusnya

---

<sup>25</sup> Ibid. Hal. 29

<sup>26</sup> Sadono Sukirno. "Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru". Penerbit: Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hal. 528-530.

katakanlah resesi berlaku secara tiba-tiba. Pemerintah takut keadaan ini akan menjadi semakin serius dan melaksanakan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansioner. Pada waktu yang sama dengan pelaksanaan kebijakan fiskal ini sektor swasta sudah dengan sendirinya pulih kembali sehingga kedua-dua perubahan itu pada akhirnya menimbulkan inflasi. Dalam contoh ini kebijakan pemerintah telah menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi semakin tidak stabil.

Dari contoh di atas dapatlah disimpulkan bahwa pemerintah perlu berhati-hati membuat interpretasi tentang masalah ekonomi yang sebenarnya dihadapi. Keadaan ini menyebabkan masalah yang dinamakan “recognition lag” yang diartikan sebagai periode di antara bermulanya/mulai berlakunya masalah yang dihadapi dengan masanya disadari kebijakan perlu dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut.

b. Masalah Dalam Merumuskan Kebijakan Ekonomi.

Apabila pemerintah telah menyadari bahwa masalah yang dihadapi perlu diatasi dengan melaksanakan beberapa kebijakan stabilisasi ekonomi, langkah-langkah tersebut tidak dengan serta merta dapat dilaksanakan. Akan terdapat beda waktu diantara (i) menyadari masalah yang dihadapi dengan (ii) waktu di mana kebijakan-kebijakan ekonomi mulai dilaksanakan atau berfungsi. Perbedaan waktu ini dinamakan “decision lag” atau “inside lag”. Periode dari beda waktu ini (decision lag atau inside lag) bergantung kepada jenis kebijakan stabilisasi ekonomi yang dijalankan. Untuk kasus penstabil otomatis, Periode dari decision lag adalah nol – yaitu secara otomatis ia sudah akan berfungsi untuk mengatasi masalahnya. Untuk kebijakan moneter, decision lag-nya relatif singkat. Ini disebabkan pada umumnya bank sentral tidak memerlukan izin dari DPR dan kabinet untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi.

Biasanya masalah decision lag adalah paling serius dalam merumuskan kebijakan fiskal. Ini disebabkan oleh dua faktor penting. Yang pertama, perumus-perumus kebijakan fiskal biasanya memerlukan waktu yang lebih lama untuk memikirkan kebijakan yang sebaiknya dijalankan dalam usaha untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, dalam pemerintahan yang bersifat demokratis, kebijakan tersebut perlu terlebih dahulu disetujui oleh kabinet dan DPR

sebelum dapat dilaksanakan. Dua faktor ini menyebabkan decision lag adalah relatif panjang untuk kebijakan fiskal.

c. Perbedaan Waktu di Antara Kebijakan dan Efeknya.

Kebijakan ekonomi akan memerlukan waktu untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Perbedaan waktu di antara pelaksanaan kebijakan dan efek sepenuhnya yang dirasakan dalam ekonomi dinamakan action lag atau outside lag. Kebijakan ekonomi yang action lag-nya relatif cepat adalah kebijakan fiskal ekspansioner yang berbentuk menambah perbelanjaan agregat dan perbelanjaan pemerintah secara otomatis akan mengambah perbelanjaan agregat dan pendapatan nasional. Selanjutnya pertambahan pendapatan nasional itu akan menimbulkan proses multiplier yang akan menambah konsumsi dan pertambahan pendapatan nasional yang berikutnya.

Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pajak tidak akan menimbulkan perubahan secepat seperti pertambahan pengeluaran pemerintah yang dinyatakan di atas. Penurunan pajak akan memerlukan waktu sebelum efeknya dirasakan oleh penerima-penerima pendapatan. Seterusnya bagaimana reaksi penerima pendapatan ke atas kenaikan pendapatan disepelnya (sebagai akibat pengurangan pajak) sangat tergantung kepada sikap individu dalam melakukan konsumsi. Keadaan-keadaan ini menyebabkan action lag kebijakan menurunkan pajak adalah lebih panjang dari yang berlaku untuk kebijakan menambah perbelanjaan pemerintah. Kebijakan moneter juga mempunyai action lag yang relatif panjang. Penambahan penawaran uang atau perubahan suku bunga baru dirasakan efeknya dalam perekonomian setelah pengusaha-pengusaha meningkat kegiatan mereka melakukan investasi. Peningkatan investasi inilah yang akan meningkatkan perbelanjaan agregat dan seterusnya menimbulkan multiplier yang pada akhirnya akan menambah pendapatan nasional.

## **VI. KEBIJAKAN FISKAL DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM**

Ada sebuah diskusi luas tentang peran kebijakan fiskal dalam Islam. ekonomi yang menyentuh hampir semua aspek keuangan publik. Titik awal diskusi adalah apakah tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang dengan cara apapun berbeda dari orang-orang

di negara lain. Berkenaan dengan pertanyaan ini, menurut Faridi<sup>27</sup>, Salama<sup>28</sup>, Kahf<sup>29</sup> dan Metwally<sup>30</sup> sangat menekankan bahwa kebijakan fiskal di negara Islam harus memiliki orientasi ideologis. Secara khusus ini berarti bahwa kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam harus berkembang di susunan berdasarkan ideologi Islam dan tidak bisa menjadi netral-nilai. Ini adalah tanggung jawab negara Islam untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dan, kebijakan negara termasuk kebijakan fiskal harus mencerminkan filosofi dasar ini. Hal ini kemudian yang membedakan gambaran dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Juga kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam tidak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi seperti dalam sistem ekonomi kapitalis, tetapi mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi sumber daya ditengah-tengah masyarakat terjadi.<sup>31</sup>

Berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena itu, kebijakan fiskal di dalam Islam didasari oleh suatu politik ekonomi (*as siyasatu al iqtishadi*) yang bertujuan mencapai distribusi ekonomi yang adil.

Dalam sistem ekonomi Islam, dominasi kebijakan fiskal pemerintah di sektor riil ekonomi begitu jelas terlihat. Hal ini juga tergambar bagaimana instrumen fiskal Islam begitu mendominasi pembahasan ekonomi para pakar ekonomi Islam klasik. Apalagi pilar

---

<sup>27</sup> Faridi. "A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State." In *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Ed. By Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal, Fahim Khan. Institute of Policy Studies And International Centre for Research in Islamic Economics – 1983. Hal. 23.

<sup>28</sup> Abidin Ahmed Salama. "Fiscal Policy of an Islamic State." In *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Ed. By Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal, Fahim Khan. Institute of Policy Studies And International Centre for Research in Islamic Economics – 1983. Hal. 87.

<sup>29</sup> Manzer Kahf. "Taxation Policy in an Islamic Economy". In *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Ed. By Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal, Fahim Khan. Institute of Policy Studies And International Centre for Research in Islamic Economics – 1983. Hal. 114.

<sup>30</sup> M. M. Metwally. "Fiscal Policy in an Islamic Economy." In *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Ed. By Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal, Fahim Khan. Institute of Policy Studies And International Centre for Research in Islamic Economics – 1983. Hal. 50.

<sup>31</sup> An-Nabhani. 2000. Dalam Nurul Huda et al. "Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah." Penerbit: Kencana. Jakarta. Hal.217.

utama dan pertama Al-Qur'an dengan perekonomian Islam menyebutkan mekanisme fiskal zakat menjadi syarat dalam perekonomian riil.<sup>32</sup>

Ada beberapa instrumen fiskal yang menjadi alat bagi negara untuk menjalankan perekonomian menuju kesejahteraan spiritual dan material, baik yang disyaratkan secara syariah maupun yang dilakukan sesuai wewenang negara, seperti zakat, kharaj, jizyah dan ushur yang bersifat wajib (*obligatory*) dan infak, sedekah, hibah, wakaf yang bersifat sukarela (*voluntary*) sedangkan ghanimah merupakan sebuah hasil yang bergantung pada kemenangan dari sebuah peperangan yang dilakukan oleh negara.

Pada instrumen kebijakan fiskal, mekanisme zakat memastikan aktivitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal, yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer, sedangkan infak-sedekah dan instrumen sejenis lainnya mendorong permintaan agregat, karena fungsinya yang membantu umat untuk mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum. Dan aktivitas ekonomi produktif ini bermakna sumber daya ekonomi berputar pada tingkat yang maksimal.<sup>33</sup>

## **VII. KEBIJAKAN FISKAL COUNTERCYCLICAL DAN KISAH NABI YUSUF.**

Alquran telah jelas menceritakan tentang adanya siklus bisnis dalam perekonomian dan cara pengelolaannya. Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43-48 telah menceritakan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan masyarakat Mesir pada zaman nabi Yusuf, A.S. Dikisahkan bahwa pada zaman nabi Yusuf, A.S., raja Mesir saat itu bermimpi melihat tujuh ekor sapi gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus dan tujuh tangkai gandum yang hijau dan (tujuh tangkai ) yang lain kering. Nabi Yusuf, A.S., mengartikan mimpi tersebut bahwa akan terjadi tujuh masa di mana perekonomian akan mengalami *booming* (masa subur), dan tujuh masa kemudian mengalami paceklik (*resesi*).<sup>34</sup>

Mimpi di maknai bahwa dalam perekonomian akan ada siklus bisnis. Saran beliau adalah bahwa pada masa *booming*, bercocok tanamlah selama tujuh tahun tersebut secara biasa. Sebagian yang telah dipanen hendaklah disimpan bersama tangkainya dan sedikit sisanya adalah untuk konsumsi sekarang. Kemudian jika telah datang masa tujuh tahun kemarau (kelaparan), simpanan makanan dapat dikonsumsi dan sebagian kecil disisakan

---

<sup>32</sup> Nurul Huda et al. "Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah." Penerbit: Kencana. Jakarta. Hal.214-215.

<sup>33</sup> Ibid. Hal. 214-215.

<sup>34</sup> <http://chennyseftarita.blogspot.com/Kebijakan> Pemerintah Dalam Ekonomi Islam.



untuk menjadi benih dan begitu seterusnya. Kebijakan ini berhasil membawa perekonomian mesir pada tingkat kemakmuran. Di mana Mesir dapat melalui tahap-tahap siklus bisnis dengan baik. Kebijakan anggaran surplus yang diterapkan baik dalam tingkat individu maupun pemerintah dizaman nabi Yusuf, A.S ini merupakan adanya bukti bahwa kebijakan ekonomi telah ada jauh sebelum teori modern tentang kebijakan anggaran dan teori siklus bisnis muncul.<sup>35</sup>

Dalam konteks modern, masa kaya raya dapat di sinonimkan sebagai masa *booming*, dimana indikator perekonomian rata-rata mengalami peningkatan, seperti; pertumbuhan ekonomi, surplus neraca perdagangan dan pembayaran, naiknya harga minyak bumi, swasembada pangan, dan lain-lain. Sebagai contoh kasus, Indonesia pernah mengalami masa boom minyak (*oil boom*) pada tahun 1973 dan 1979, dimana terjadi kenaikan harga-harga minyak di pasaran internasional. Pada saat itu potret perekonomian Indonesia terlihat sangat bagus dan gemilang berkat kejutan-kejutan minyak tersebut. Masa paceklik dalam sejarah nabi Yusuf A.S dapat diistilahkan sebagai masa depresi (*depreciation*) dimana terjadi penurunan terendah dalam aktivitas perekonomian (*economics down turn*). Masa krisis dalam perekonomian modern terjadi karena berlakunya pengangguran dan penurunan aktivitas perekonomian. Terkadang bahkan perekonomian dihadapkan pada masalah inflasi dan pengangguran yang terjadi bersamaan, seperti kasus krisis Asia tahun 1997/1998 lalu.<sup>36</sup>

## VIII. KONSEP KEBIJAKAN FISKAL IBNU KHALDUN

Dalam bukunya Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengakui bahwa pajak pada dasarnya merupakan sumber utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini. Karena itulah baginya pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang maksimal. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa lembaga perpajakan merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara. Dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa bila pemerintah semakin besar nilai belanjanya, atau semakin banyak menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan, maka dampaknya akan semakin baik bagi perekonomian negara tersebut. Dengan adanya anggaran yang cukup untuk dipergunakan oleh negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, ekonomi dan politik yang ada di

---

<sup>35</sup> Ibid

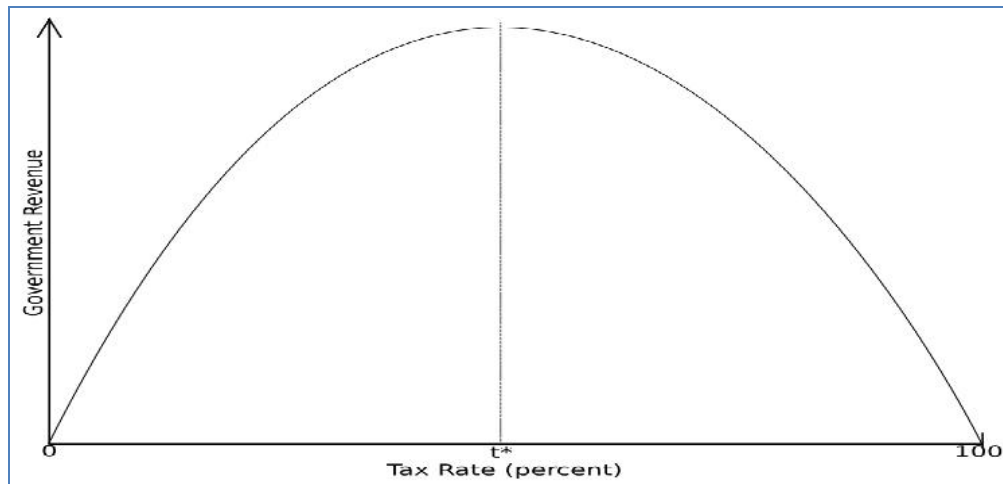
<sup>36</sup> Ibid

negara tersebut. dari rangkaian pemikiran Ibnu Khaldun dalam konsep keuangan publik dan perpajakan yang disampaikan dalam karya besarnya tersebut, secara tersirat beliau ingin menyatakan bahwa sangat perlu adanya keterlibatan dari pihak pemerintah dalam masalah pengaturan kegiatan perekonomian ini. Hal ini dalam dunia ekonomi modern sekarang kemudian dikenal dengan konsep kebijakan fiskal.

Menurut Ibnu Khaldun pemerintah adalah pasar terbesar (ibu dari semua pasar). Oleh karenanya negara adalah faktor produksi terpenting di mana produksi bergantung pada penawaran dan permintaan terhadap produk. Untuk itu sisi pengeluaran keuangan publik sangat penting (tanpa infrastruktur yg disiapkan oleh negara, mustahil terjadi populasi yg besar, dan tanpa ketertiban dan kestabilan politik, produsen tidak memiliki insentif utk berproduksi. Pemerintah menjalankan fungsi terhadap sisi permintaan pasar (dengan permintaannya pemerintah memicu produksi). Ibnu Khaldun juga mengajukan solusi atas resesi dengan cara mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Jika pemerintah menghentikan belanjanya, krisis akan terjadi. Oleh karena itu semakin banyak yg dibelanjakan oleh pemerintah semakin baik akibatnya bagi perekonomian.

Selanjutnya Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pajak menghasilkan pendapatan yang besar dari pembebanan yang kecil, sebaliknya Pajak menghasilkan pendapatan yang kecil dari pembebanan yang besar. Adapun maksud dari pernyataan ini adalah bahwa pajak yang rendah akan memotivasi masyarakat utk bekerja lebih giat, tingkat produksi naik dan akan meningkatkan pendapatan pajak, dan sebaliknya. Terdapat optimum fiskal yang dapat mendorong timbulnya produksi yg konsekuensinya meningkatkan pendapatan negara.

Teori penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dijelaskan lebih lanjut oleh Arthur Laffer (1974) melalui suatu grafik untuk menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi tidak selalu menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Bahkan bisa jadi tariff pajak yang lebih tinggi akan membunuh aktivitas ekonomi, yang mengakibatkan pendapatan pajak menurun.



Laffer sendiri mengakui bahwa bukanlah dia sendiri yang menemukan konsep ini. Karena jauh sebelum peradabannya Ibnu Khaldun telah menyampaikan konsep ini dalam kitabnya (*Muqadimmah* (Arab), *Prolegomena* (Latin), 1377). Ibnu Khaldun menggunakan pendekatan dialektik dalam menerangkan konsep ini.

## IX. STUDI EMPIRIS TENTANG KEBIJAKAN FISKAL

Terdapat banyak literatur hasil studi empiris tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Untuk kasus Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Baldacci (2009)<sup>37</sup> dan juga hasil riset dari Bank Indonesia (2009)<sup>38</sup> yang menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia sejauh ini belum diarahkan untuk bagaimana melunakkan pergerakan siklus bisnis yang berlangsung, atau dengan kata lain bersifat asiklikal (*acyclical*). Temuan Baldacci dalam perekonomian Indonesia untuk periode setelah krisis (2000-2009), menyatakan bahwa respon kebijakan fiskal yang asiklikal telah menyebabkan tingginya volatilitas dalam variabel-variabel makroekonomi. Jika hal tersebut disertai pula dengan rendahnya disiplin fiskal dan buruknya pengelolaan anggaran, maka *shock* dalam *administered price* cenderung menjadi tak terhindarkan berkaitan dengan *fiscal rule* untuk menjaga keseimbangan likuiditas pemerintah. Keadaan ini pada akhirnya dapat

<sup>37</sup> Baldacci. "Neither Sailing Against the Wind, Nor Going with the Flow: Cyclicity of Fiskal Policy in Indonesia, IMF Country Report No. 09/231." 2009.

<sup>38</sup> Bank Indonesia. "Siklikalitas Kebijakan Fiskal di Indonesia." Catatan Riset No. 11/15/DKM/BRE/CR. 2009.

memperlemah ekspektasi swasta dan memicu reaksi pasar yang berpotensi menetralkan tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri.<sup>39</sup>

Secara umum, alasan mengapa negara berkembang menempuh kebijakan fiskal yang tidak *countercyclical* terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya finansial dan kelemahan institusional. Kelemahan institusional diantaranya terkait dengan adanya kelompok yang cukup berpengaruh dalam masyarakat yang berusaha agar kepentingannya diakomodasi oleh pemerintah. Kelemahan ini menyebabkan terjadinya diskresi kebijakan fiskal yang dapat menyebabkan volatilitas inflasi yang lebih tinggi. Transmisi kebijakan fiskal ke inflasi dapat melalui permintaan agregat, *spillover public wages* ke sektor swasta, serta pengaruh pajak terhadap biaya marginal dan konsumsi swasta. Selain itu, kebijakan fiskal berdampak terhadap inflasi melalui ekspektasi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk membayar utang publiknya.<sup>40</sup>

Selanjutnya de Castro dan de Cos (2006)<sup>41</sup> yang menganalisis dampak *shock* fiskal terhadap perekonomian Spanyol periode 1980.1-2004.4 menemukan bahwa dampak pengeluaran pemerintah signifikan meningkatkan inflasi. Efek multiplier dari pengeluaran pemerintah terhadap output sangat lemah, dimana efek positif hanya terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang menjadi negatif. Sementara dampak pajak terhadap output adalah positif dalam jangka pendek dan negatif dalam jangka panjang, dimana secara keseluruhan adalah negatif. Demikian pula dampak penerimaan pajak terhadap inflasi yang secara keseluruhan adalah negatif. Respon suku bunga adalah positif baik dalam menanggapi *shock* pengeluaran pemerintah maupun *shock* pajak. Implikasinya adalah bahwa pengeluaran pemerintah mungkin dapat meningkatkan output dalam jangka pendek namun dengan biaya inflasi yang sangat tinggi, bertambahnya defisit, serta penurunan output dalam jangka menengah.

## X. KESIMPULAN

---

<sup>39</sup> Rogatianus Maryatmo. "Dampak Moneter: Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah dan Peranan Asa Nalar Dalam Simulasi Model Makro – Ekonomi Indonesia 1983:1-2002:4. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 2004.

<sup>40</sup> Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, Budi Trisnanto. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol. 14, No. 4, April 2012. Hal. 392.

<sup>41</sup> Francisco de Castro Fernández and Pablo Hernández de Cos. "The Economic Effects of Exogenous Fiscal Shocks in Spain a SVAR Approach." Working Paper Series. No. 647. European Central Bank, 2006.

Dari berbagai teori dan studi-studi empiris tentang strategi kebijakan fiskal baik dalam sistem ekonomi konvensional maupun sistem ekonomi Islam, terlihat bahwa idealnya kebijakan fiskal memiliki sifat sebagai *automatic stabilizer* perekonomian. Artinya, dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi (booming), maka pengeluaran pemerintah seharusnya berkurang atau penerimaan pajak yang bertambah (*contractionary fiscal policy*). Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi (resesi), kebijakan fiskal seharusnya ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan pajak (*expansive fiscal policy*). Dengan demikian, *automatic stabilizer* kebijakan fiskal mensyaratkan adanya fungsi *countercyclical* dari kebijakan fiskal.

### Daftar Pustaka

- Ani Sri Rahayu. "Pengantar Kebijakan Fiskal." Penerbit: Bumi Aksara. Jakarta. 2010.
- Abidin Ahmed Salama. "Fiscal Policy of an Islamic State." In Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam. Ed. By Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal, Fahim Khan. Institute of Policy Studies And International Centre for Research in Islamic Economics – 1983. Hal. 87.
- An-Nabhani. 2000. Dalam Nurul Huda et al. "Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah." Penerbit: Kencana. Jakarta. 2012.
- Baldacci. "Neither Sailing Against the Wind, Nor Going with the Flow: Cyclical Policy in Indonesia, IMF Country Report No. 09/231." 2009.
- Bank Indonesia. "Siklikalitas Kebijakan Fiskal di Indonesia." Catatan Riset No. 11/15/DKM/BRE/CR. 2009.
- Chenny Seftarita. "Teori Kebijakan Ekonomi Makro dan Siklus Bisnis." <http://chennyseftarita.blogspot.com/>
- Chenny Seftarita. "Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi Islam." <http://chennyseftarita.blogspot.com/>
- Ernesto Talvi and Carlos A. Vegh. Tax base Variability and Procyclical Fiscal Policy NBER Working Paper 7499, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Ernesto Stein, Ernesto Talvi, and Alejandro Grisanti. "Institutional Arrangements and Fiscal Performance: The Latin American Experience." Working Paper, Inter-American Development Bank, Office of the Chief Economist, No. 367.
- Francisco de Castro Fernández and Pablo Hernández de Cos. "The Economic Effects of Exogenous Fiscal Shocks in Spain a SVAR Approach." Working Paper Series. No. 647. European Central Bank, 2006.
- Faridi. "A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State." In Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam. Ed. By Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal, Fahim Khan. Institute of Policy Studies And International Centre for Research in Islamic Economics – 1983.
- Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart, Carlos A. Végh. "When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies." NBER Macroeconomics Annual 2004, Volume 19.

- Muhammad Afdi Nizar. "Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia 2000-2009." Tesis. FE UI, 2010.
- Makmun Syadullah dan Muhammad Afdi Nizar. "Kebijakan Fiskal : Teori dan Praktek di Indonesia." Penerbit: Observation & Research of Taxition (ortex), Jakarta 2013.
- M. M. Metwally. "Fiscal Policy in an Islamic Economy." In Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam. Ed. By Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal, Fahim Khan. Institute of Policy Studies And International Centre for Research in Islamic Economics – 1983.
- Manzer Kahf. "Taxation Policy in an Islamic Economy". In Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam. Ed. By Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal, Fahim Khan. Institute of Policy Studies And International Centre for Research in Islamic Economics – 1983.
- Makmun Syadullah. "Kebijakan Fiskal dan Kisah Nabi Yusuf." <http://makmunr.blogspot.com/>
- Nurul Huda et al. "Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah." Penerbit: Kencana. Jakarta. 2012.
- Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, Budi Trisnanto. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol. 14, No. 4, April 2012.
- Naf'an. "Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah." Penerbit: Graha Ilmu. Yogyakarta
- Philip R. Lane. "Irish Fiscal Policy under EMU." Irish Banking Review, Winter 1998.
- Rogatianus Maryatmo. "Dampak Moneter: Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah dan Peranan Asa Nalar Dalam Simulasi Model Makro – Ekonomi Indonesia 1983:1-2002:4. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 2004.
- Sadono Sukirno. "Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru". Penerbit: Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.